



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2024/Periodik - 2023)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NUGROHO WIGIJARTO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI
3. NHK : 73400

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **3.471.570.000**

1. Tanah Seluas 163 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 42.000.000
2. Tanah Seluas 979 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.122.913.000
3. Tanah Seluas 512 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 724.992.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/126 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 423.639.000
5. Tanah Seluas 503 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI , WARISAN , Rp. 519.096.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/100 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 638.930.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **707.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO 150 CC Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
3. MOBIL, TOYOTA INNOVA Q Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 285.000.000



4. MOBIL, TOYOTA YARIS TRD SPORTIVO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 265.000.000
5. MOTOR, HONDA SCOOPY PRESTIGE Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000
6. MOTOR, HONDA VARIO / 160 CC Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000
7. MOTOR, YAMAHA AEROX 155CC Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	221.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.806.980.444
F. HARTA LAINNYA	Rp.	216.296.900
Sub Total	Rp.	6.423.347.344
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.423.347.344

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.